

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN / KOTA
(Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2010)**

Agus Budi Santosa

Mohamad Ainur Rofiq

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

agusbudi5@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research was hold to examine the influence of Local Government Original Receipt, the General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund on Capital Expenditures with a case study on the district / city in the province of West Java, Central Java and East Java, and to know comparison of the influence of Local Government Original Receipt, the General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund on Capital Expenditures in the third against the province. The data used in this study is a secondary data annual time series (Time Series) 2007 s / d 2010. Data include Realized of Local Government Original Receipt, the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and Capital Expenditure in District / City in the province of West Java, Central Java and East Java. The data analysis technique used is multiple linear regression to test hypotheses using t-statistics and goodness of fit testing using the F-statistic models. The results provide information that: (1) In the province of West Java, local government original receipt has a positive and significant effect on capital expenditures, while the General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund had no significant effect on capital expenditures. (2) In the province of Central Java, the General Allocation Fund has a positive and significant effect on capital expenditures, while the Special Allocation Fund has a negative and significant effect on capital expenditures but local government original receipt does not have a significant effect on capital expenditures. (3). In the province of East Java, local government original receipt and the General Allocation Fund have a positive and significant effect on capital expenditures, while DAK had no Receipt to Capital Expenditures in the province of West Java are stronger than in Central Java and East Java, with the value of the standardized coefficient of 0.607 and significant at the Central Java province of 0.120 and 0.261 of East Java province. (5) influencet of the General Allocation Fund on capital expenditures in the province of East Java is stronger than the Province of West Java and Central Java to the value of the standardized coefficient of 0.500 and significant at the West Java province of 0.101 and 0.411 of Central Java Province. (6) Influence the Special Allocation Fund of against Capital Expenditure in the province of Central Java is stronger than the Province of West Java and East Java, with the value of the standardized coefficient of -0.200 and significant, while in West Java province of 0.118 and -0.084 for Central Java Province.

Keywords: *local government original receipt, the general allocation fund, the special allocation fund, and capital expenditure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta untuk mengetahui perbandingan pengaruh PAD, DAK dan DAU terhadap Belanja Modal di ketiga Provinsi tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahunan runtut waktu (Time Series) 2007 s/d 2010. Data meliputi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan t-statistik dan pengujian goodness of fit model menggunakan F-statistik dan Koefisien Determinasi. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa : (1) Di Provinsi Jawa Barat, PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan DAU dan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Di Provinsi Jawa Tengah, DAU mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal tetapi PAD tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. (3). Di Provinsi Jawa Timur, PAD dan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. (4) Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat lebih kuat dibandingkan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nilai standardized koefisien sebesar 0,607 dan signifikan sedangkan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,120 dan di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,261. (5) Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur lebih kuat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan nilai standardized koefisien sebesar 0,500 dan signifikan sedangkan di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,101 dan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,411. (6) Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah lebih kuat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa

koefisien sebesar -0,200 dan signifikan sedangkan di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,118 dan di Provinsi Jawa Tengah sebesar -0,084.

Kata Kunci : pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan belanja modal

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif diberlakukan per Januari tahun 2001. Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tersebut, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Perwujudan kemandirian daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya tersebut dijabarkan melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan varian dari pelaksanaan desentralisasi yang ditempuh suatu negara, yang dapat didefinisikan sebagai devolusi (penyerahan) tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya, *sub-national levels of government*, seperti negara bagian, daerah, propinsi, distrik, dan kota (Hamid R. Davaodi, 2001). Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kemandirian daerah dalam mengelola sumber-sumber kekayaan daerahnya untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Di Indonesia pelaksanaan desentralisasi fiskal memunculkan persoalan baru dikarenakan tingkat kesiapan fiskal masing-masing daerah yang berbeda. Daerah yang kaya akan potensi keuangan akan memiliki sumber pendanaan daerah (PAD) yang semakin besar sehingga daerah akan semakin maju, yang tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Penelitian oleh Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adanya perbedaan disparitas PAD tersebut mengakibatkan ketimpangan fiskal antar daerah, daerah yang memiliki PAD besar akan mampu untuk mencukupi sebagian besar belanjanya, sebaliknya daerah dengan PAD relatif kecil akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan belanjanya. Untuk mengatasi disparitas tersebut diperlukan campur tangan pemerintah pusat dengan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU menurut UU No. 33 tahun 2004 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus. Penggunaan DAK untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang serta membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun.

Hasil penelitian oleh Adi (2006) dalam Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa proporsi DAU terhadap penerimaan daerah dalam beberapa tahun berjalan masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu membiayai seluruh pengeluarannya dengan dana/modal sendiri, atau dengan kata lain masih sangat tergantung pada sum

sumber dana pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan berdampak pada ketidakleluasaan daerah untuk menggunakan sumber dana yang dimiliki karena sifat dari sumber dana pusat yang merupakan sumber dana eksternal yang umumnya penggunaannya sudah dikendalikan oleh pemberi dana.

Kondisi tersebut di atas juga terjadi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki akses sumber penerimaan daerah dan diharapkan dapat mendukung belanja daerah dan kegiatan

perekonomian serta memiliki kemandirian secara finansial, akan tetapi data Tahun 2008 dan 2009 menunjukkan bahwa kontribusi rata - rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 9,84 % pada Tahun 2008 dan 10,04 % pada Tahun 2009 dari Total Penerimaan di daerah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur terhadap pemerintah pusat.

Tabel 1. Rata-rata kontribusi PAD, DAU dan DAK terhadap Total Penerimaan daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2007 s/d 2010

Provinsi	PAD (%)		DAU (%)		DAK (%)	
	Th. 2007	Th. 2008	Th. 2007	Th. 2008	Th. 2007	Th. 2008
Jawa Barat	10,06	10,12	60,23	65,48	4,39	4,94
Jawa Tengah	9,45	9,07	71,62	70,22	7,65	7,71
Jawa Timur	10,47	10,28	64,84	68,74	7,06	7,37

Provinsi	PAD (%)		DAU (%)		DAK (%)	
	Th. 2009	Th. 2010	Th. 2009	Th. 2010	Th. 2009	Th. 2010
Jawa Barat	9,93	10,34	56,24	57,24	4,24	4,18
Jawa Tengah	9,70	9,26	66,54	69,22	7,30	7,21
Jawa Timur	10,45	10,08	61,49	63,72	6,60	7,10

Sumber : Data sekunder yang diolah

Penerimaan daerah baik yang berasal dari daerah sendiri berupa PAD maupun dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, merupakan sumber pembiayaan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, semakin besar penerimaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar jumlah yang dapat dibelanjakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan di daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber-sumber dana secara baik yakni dengan mengarahkan pembelanjannya pada kegiatan yang akan memberikan dampak kepada masyarakat, yakni terutama pada sektor-sektor yang berkaitan erat dengan pelayanan kepentingan publik. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai dan investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa untuk membiayai penyediaan kebutuhan pelayanan publik sebagai salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, maka peran dana perimbangan (DAU dan DAK) sangat signifikan untuk membiayai belanja daerah khususnya belanja yang menyediakan kebutuhan publik yaitu belanja modal. Dalam penelitian Legrensi dan Milas (2001) dan Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer (dana perimbangan) berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer (dana perimbangan) dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh temuan empiris yang sama yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah.

Hal ini berbe
dilakukan oleh Sri

menemukan bukti bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Eko Setiyani (2009) yang melakukan penelitian pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal pada kabupaten / kota di Jawa Tengah dan DIY. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan DAU pada kabupaten / kota di Jawa Tengah dan DIY tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga terdapat *research gap* dan perlu dilakukan penelitian ulang mengenai permasalahan tersebut.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini ditambah satu variabel lagi yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan komponen dana perimbangan dan belum diakomodir dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Eko Setiyani (2009). Penelitian ini menggunakan sampel yang lebih luas dari penelitian sebelumnya yaitu kabupaten / kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Desentralisasi (Otonomi Daerah)

Pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi didasarkan pada UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 1. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sidik (2000), desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD,

dan adanya bantuan dalam bentuk tranfer dari Pemerintah Pusat.

Desentralisasi bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik et al, 2002). Pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal.
- b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom dan penyerahan atau pengakuan atas wewenang pemerintahan di bidang tertentu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang tertentu pula.
- c. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut : Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement, SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah Pusat serta keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pengutan pajak dan retribusi daerah. Untuk dapat menjalankan desentralisasi fiskal secara efektif, maka Pemerintah Daerah mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, yang berakibat mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Manajemen Keuangan Daerah

Berkaitan dengan desentralisasi, manajemen keuangan tersebut dapat diaplikasikan dalam manajemen keuangan daerah yang terbagi dalam daerah dan manajer

Manajemen keuangan penerimaan daerah sejalan dengan fungsi pemenuhan kebutuhan dana, di mana sumber penerimaan daerah dapat berasal dari sumber intern berupa pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber ekstern berupa dana perimbangan. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dari sisi intern membawa konsekuensi adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah sendiri. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana tersebut harus diikuti dengan pemberian keleluasaan dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan dana sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat daerah. Dari sisi ekstern, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect* yang besar. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan implikasi kepada pemerintah daerah dengan keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, sumber pembiayaan keuangan daerah yang harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Sumber PAD

terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Halim (2002), upaya mobilisasi PAD dapat dilakukan melalui 2 pola yaitu (1) Intensifikasi, peningkatan pendapatan dilakukan dengan lebih menekankan pada penerapan nilai atau prinsip-prinsip perpajakan yang baik. Baik itu pada sumber pendapatan yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan usaha-usaha lainnya yang sah. (2) Ekstensifikasi, peningkatan pendapatan pemda dilakukan dengan lebih menekankan pada perluasan sumber-sumber pendapatan baru baik yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah, maupun usaha-usaha lainnya yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan merupakan perwujudan konsep transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berlaku di Indonesia.

Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini menggunakan dana perimbangan berupa DAU dan DAK sebagai variabel independen. Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana yang bersifat umum (Block Grant). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana alokasi umum masing-masing daerah ditentukan berdasarkan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan tersedianya dana APBN (Mardiasmo, 2002). Daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi akan memperoleh alokasi

Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.

Penghitungan DAU didasarkan pada 2 faktor yaitu (1) faktor murni dan (2) faktor penyeimbang. Faktor murni adalah penghitungan DAU berdasarkan formula sedangkan faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah. Dimasukkannya faktor penyeimbang dalam penghitungan DAU adalah karena adanya kelemahan dalam faktor murni.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi khusus (DAK) merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus. Meskipun dana DAK seluruhnya berasal dari APBN namun diisyaratkan bahwa daerah wajib menyediakan dana pendamping yang berasal dari penerimaan umum APBD. Penggunaan DAK untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang serta membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun.

Belanja Modal

Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk pembelian dan penambahan barang modal. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal bagi perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang.

Sejalan dengan otonomi daerah dan desentralisasi, investasi dilakukan dalam bentuk belanja daerah dengan menggunakan sumber dana PAD, DAU dan DAK. Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 36, belanja daerah dibagi dalam 2 kelompok belanja :

- a. Belanja tidak langsung
Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan social, dsb.
- b. Belanja Langsung
Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja Modal (belanja pembangunan)

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk belanja modal diantaranya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi. Pembangunan dengan menekankan pada sektor sentral yang berkaitan dengan masyarakat tersebut dengan harapan masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Holtz—Eakin Et Al (1994) menunjukkan bahwa ada keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat atau Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan obyek penelitian kabupaten / kota se-Jawa dan Bali, menunjukkan bahwa PAD dan DAU memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan Sri Eko Setiyani (2009) dengan obyek penelitian kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitiannya dia membuktikan bahwa PAD dan DAU tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Adanya research gap inilah yang memungkinkan untuk mengungkap pengaruh

penerimaan daerah yaitu PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah, dimana pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal khususnya melalui PAD. Salah satu ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Halim, 2001).

PAD sebagai sumber lokal daerah digunakan sebagai sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2007) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap belanja daerah. Hasil ini sejalan hasil penelitian Maimunah (2006) bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah yang berarti semakin besar PAD maka semakin besar pula Belanja Daerah. Dalam penelitian lainnya oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) membuktikan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1): PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum diperuntukkan untuk belanja pegawai dan selebihnya tergantung pemerintah daerah untuk pengalokasiannya baik untuk belanja barang dan jasa maupun belanja modal..

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan agar daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU). Di beberapa daerah peran dana alokasi umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah dana alokasi umum dari pada pendapatan asli daerah (Sidik, et. Al, 2002).

Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana pendapatan secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana alokasi umum yang diterima daerah lebih besar.

Penelitian terdahulu yang lain dilakukan oleh Prakoso (2004) yang memperoleh temuan empiris yang sama bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber dana alokasi umum ini. Berdasarkan konsep dan penelitian terdahulu diatas maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 2 (H2): Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dana transfer dari pemerintah selain Dana Alokasi Umum juga berupa dana alokasi khusus (DAK). DAK diperuntukkan untuk belanja daerah sesuai dengan ketentuan umum dari pusat. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh (Holtz-Eakin et. Al, 1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Menurut Gamkhar dan Oates (1996) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

Hal-hal ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Sukri dan Halim (2004) yang menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer dari pemerintah pusat dapat menyebabkan penurunan dalam alokasi belanja daerah.

Dari penelitian-penelitian terdahulu, bahwa dana alokasi khusus (DAK) yang merupakan salah satu dari dana perimbangan (dana transfer dari pemerintah pusat) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan adanya indikasi bahwa belanja daerah termasuk belanja modal juga dipengaruhi sumber penerimaan ini. Berdasarkan konsep dan penelitian terdahulu di atas maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 3 (H3): Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam kurun waktu tahun anggaran 2007 dan 2010.

Jenis Dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan

Jawa Timur yang telah dipublikasikan melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id).

Data yang diambil adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal untuk tahun anggaran 2007 dan 2010.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan mendapatkan data-data dan teori yang diperoleh dari literatur, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan landasan teori. Selain itu dilakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dari website milik DJPK dan BPS Jawa Tengah.

Definisi Operasional

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah sendiri. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi khusus (DAK) juga merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus. Penggunaan DAK untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dan panjang serta

pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun.

Belanja Modal

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Komponen belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal.

Alat Analisis

Untuk membuktikan hipotesis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal atau estimasi persamaan di atas digunakan pendekatan ekonometrika dengan analisis regresi kuadrat terkecil sederhana OLS (*Ordinary Least Square*),

model penelitian sebagai berikut :

$$BM = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Dimana :

- BM = Belanja Modal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- β = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien variable independen.
- e = Disturbance error

Analisis Data

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas untuk ketiga provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual		
		Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
N		103	140	152
Normal Parameters ^a	Mean	.0000178	.0000191	.0000000
	Std. Deviation	7.15286447E10	4.29827629E10	.33865479
Most Extreme Differences	Absolute	.111	.062	.074
	Positive	.111	.062	.065
	Negative	-.053	-.030	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		1.123	.737	.912
Asymp. Sig. (2-tailed)		.161	.650	.376

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* untuk ketiga Provinsi diatas nilai sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi terdistribusi secara normal.

6.1. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas untuk ketiga provinsi sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas Provinsi Jawa Barat

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.279	1.373		.932	.354
	Log_pad	-.010	.040	-.027	-.250	.803
	Log_dau	-.059	.040	-.156	-1.469	.145
	Log_dak	.037	.025	.145	1.456	.149

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Provinsi Jawa Tengah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.157E10	9.729E9		1.189	.236
	Pad	.015	.062	.024	.248	.805
	Dau	.018	.021	.089	.868	.387
	Dak	.208	.138	.141	1.507	.134

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas di Provinsi Jawa Timur

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.581	1.185		-.491	.624
	Log_pad	.028	.036	.094	.789	.431
	Log_dau	-.020	.065	-.038	-.303	.762
	Log_dak	.027	.030	.087	.897	.371

a. Dependent Variable: AbsRes_5

Dari tabel 3,4 dan 5 diatas dapat diketahui bahwa data ketiga provinsi tidak terjadi heteroskedastisitas, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi ketiga variable independen pada ketiga provinsi diatas nilai sebesar 5 % yang artinya bahwa tidak ada variabel independen

yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute residual.

2. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi untuk ketiga provinsi sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual		
	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
Test Value ^a	-.03134	-2.97151E9	.03302
Cases < Test Value	51	70	75
Cases >= Test Value	52	70	75
Total Cases	103	140	150
Number of Runs	51	60	69
Z	-.296	-1.866	-1.147
Asymp. Sig. (2-tailed)	.767	.062	.251

a. Median

Dari tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig dari ketiga provinsi lebih dari nilai sebesar 5 %

yang berarti bahwa residual untuk data random atau tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas sebagai berikut :

Tabel 7. Uji Multikolinieritas untuk data Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.903	2.446		3.641	.000		
Log_pad	.512	.072	.607	7.115	.000	.813	1.230
Log_dau	.086	.071	.101	1.208	.230	.844	1.185
Log_dak	.068	.045	.118	1.497	.137	.959	1.042

a. Dependent Variable: lbn

Tabel 8. Uji Multikolinieritas untuk data Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.370E10	1.512E10		4.213	.000		
Pad	.134	.096	.120	1.393	.166	.784	1.276
Dau	.146	.033	.411	4.419	.000	.676	1.478
Dak	-.502	.214	-.200	-2.345	.020	.804	1.243

a. Dependent Variable: bm

Tabel 9. Uji Multikolinieritas untuk data Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.671	1.874		4.092	.000		
Log_pad	.170	.057	.261	2.988	.003	.477	2.095
Log_dau	.564	.103	.500	5.486	.000	.437	2.289
Log_dak	-.056	.048	-.084	-1.179	.240	.715	1.400

Dari tabel 7,8 dan 9 di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen tidak ada yang kurang dari 0,10 dan nilai VIF tidak ada yang kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak ada multikolonearitas antar variabel independen

Dari uji F diperoleh nilai signifikansi untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebesar 0,0000, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal atau dapat dikatakan bahwa PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

6.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Statistik F Provinsi Jawa Barat
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.313	3	4.104	23.248	.000 ^a
	Residual	17.478	99	.177		
	Total	29.791	102			

a. Predictors: (Constant), Log_dak, Log_dau, Log_pad

Tabel 11. Hasil Uji Statistik F Provinsi Jawa Tengah
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.609E22	3	2.203E22	11.667	.000 ^a
	Residual	2.568E23	136	1.888E21		
	Total	3.229E23	139			

a. Predictors: (Constant), dak, pad, dau

b. Dependent Variable: bm

Tabel 12. Hasil Uji Statistik F Provinsi Jawa Timur
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.829	3	4.276	43.049	.000 ^a
	Residual	14.503	146	.099		
	Total	27.332	149			

6.3. Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji Koefisien Determinasi sebagai berikut :

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Provinsi	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Jawa Barat	.643 ^a	.413	.396	.42017
Jawa Tengah	.452 ^a	.205	.187	4.34543E10
Jawa Timur	.685 ^a	.469	.458	.31518

Dari tabel 13 dapat kita lihat bahwa hasil regresi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,396 artinya bahwa 39,6% variasi Perubahan Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel tak bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sisanya sebesar 60,4 % diterangkan oleh variasi variabel lain di luar variabel tersebut.

Untuk hasil regresi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,187 artinya bahwa 18,7%

variasi Perubahan Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel tak bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sisanya sebesar 81,3 % diterangkan oleh variasi variabel lain di luar variabel tersebut.

Untuk hasil regresi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,458 artinya bahwa 45,8% variasi Perubahan Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel tak bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sisanya sebesar 54,2 % diterangkan oleh variasi variabel lain di

Uji Hipotesis

Untuk melakukan uji hipotesis digunakan uji parsial atau uji t yang memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 14. Rekap Hasil Pengujian Signifikansi Parsial

Provinsi	PAD		DAU		DAK	
	Standardized Coefisient	Signifikansi	Standardized Coefisient	Signifikansi	Standardized Coefisient	Signifikansi
Jawa Barat	0,607	Signifikan	0,101	Tidak Signifikan	0,118	Tidak Signifikan
Jawa Tengah	0,120	Tidak Signifikan	0,411	Signifikan	-0,200	Signifikan
Jawa Timur	0,261	Signifikan	0,500	Signifikan	-0,084	Tidak Signifikan

Dari tabel 14 dapat dilihat bahwa pada Provinsi Jawa Barat variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU dan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Untuk Provinsi Jawa Tengah variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, serta PAD tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Untuk Provinsi Jawa Timur variabel PAD dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Dari tabel 14 juga dapat dilihat bahwa untuk variabel PAD yang signifikan adalah pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah tidak signifikan. Nilai standardized coefficient untuk Provinsi Jawa Barat sebesar 0,607 dan di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,261 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh PAD terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat lebih kuat dibandingkan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Untuk variabel DAU hasil pengujian yang signifikan adalah pada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat hasil pengujiannya tidak

signifikan. Nilai standardized coefficient Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,411 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 0,500 dan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur lebih kuat dibandingkan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Untuk variabel DAK hasil pengujian yang signifikan adalah pada Provinsi Jawa Tengah saja dengan nilai standardized coefficient sebesar - 0,200, sedangkan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur hasil pengujiannya tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh DAK terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah lebih kuat dibandingkan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Implikasi Manajerial

Dari hasil pengujian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah daerah yaitu :

1. Guna meningkatkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya pemerintah daerah terutama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah perlu lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD sehingga ketergantungan daerah kepada DAU dapat dikurangi, karena dalam penelitian ini nada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lebih sum

yaitu DAU daripada penerimaan dari daerah sendiri yaitu PAD. Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya :

- a) Menghitung kembali berapa potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga dapat ditentukan target penerimaan pendapatan yang dapat dicapai.
 - b) Melakukan evaluasi realisasi penerimaan pendapatan di instansi-instansi yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, guna menentukan langkah-langkah pengoptimalan pencapaian target PAD pada tahun depan.
2. Meningkatkan peran DAK dalam membiayai Belanja Modal dengan lebih banyak mengalokasikan DAK untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana pembangunan yang dialokasikan lewat belanja modal, karena ternyata dalam penelitian ini di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur variabel DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan di Provinsi Jawa Tengah variabel DAK malah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal yang artinya bahwa kenaikan DAK akan menyebabkan penurunan Belanja Modal.

Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur perlu lebih banyak mengalokasikan DAK untuk membiayai Belanja Modal, diantaranya untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat seperti : sekolah dan puskesmas. Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi penggunaan DAK agar lebih tepat sasaran sesuai target yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

1. Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan variabel DAU dan DAK pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat untuk membiayai Belanja Modal lebih banyak bersumber dari PAD daripada dana transfer dari pemerintah pusat (DAU dan DAK).

2. Sebaliknya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah variabel PAD tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan variabel DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal serta variabel DAK mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa untuk membiayai belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lebih banyak bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU daripada menggunakan sumber pembiayaan dari daerah sendiri yaitu PAD.
3. Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur variabel PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa untuk membiayai belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur menggunakan sumber pembiayaan dari daerah sendiri (PAD) dan sumber pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah pusat yaitu DAU walaupun proporsi DAU masih lebih besar dari proporsi PAD.
4. Pengaruh PAD terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat lebih kuat daripada di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta pengaruh DAU belanja modal di Provinsi Jawa Timur lebih kuat daripada di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat sedangkan pengaruh DAK terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah lebih kuat daripada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rofiq, M, 2009, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2004-2007*.

- Manajemen Universitas Stikubank Semarang
- Manajemen Universitas Stikubankk Semarang.
- Abimanyu Anggito, 2005, *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*, Bappeki Dekeu.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 : Pemerintah Daerah*, Depdagri, Jakarta.
- Adi, Priyo Hari, *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah* (studi pada kabupaten dan kota se Jawa – Bali).
- _____, 2004, *Undang-Undang Nomor 33 : Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Depdagri, Jakarta.
- Darwanto, Yustikasari, Yulia, 2007, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Republik Indonesia, 2005, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 : tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Depdagri, Jakarta.
- Devas, N, Brian B, Anne B, Kenneth B, and Roy K, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Terjemahan Masri, M, UI Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 : tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Depdagri, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III, Badang Penerbit UNDIP, Semarang.
- Setiaji dan Adi, 2007, *Peta Kemampuan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran?* (Studi : Pada kabupaten dan kota se-Jawa – Bali), Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.
- Ismail, M, (2002), *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*.
- Sri Eko Setiyani, 2009, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005 – 2007*, Tesis Program Magister Manajemen Universitas Stikubankk Semarang
- Kuncoro, M, (2004), *Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*.
- Suparmoko, 1997, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Suparmoko, 1997, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.
- Panijo, 2008, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Dana Pusat (DAU) Terhadap Pendapatan Perkapita dengan Belanja Sektor Publik (Belanja Modal) Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2002 – 2006*, Tesis Program Magister